



PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 20 Tahun 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BINJAI
TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KOTA BINJAI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Binjai tahun 2021 – 2026 Sebagaimana diketahui dalam UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan PP No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Peraturan menteri Dalam Negeri tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD, setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat perencanaan strategis sebagai pola perencanaan jangka menengah serta melaporkan hasil pelaksanaan Renstra tersebut kepada publik melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Renstra Dinas Sosial Kota Binjai tahun 2021- 2026 adalah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparatur Dinas Sosial Kota Binjai dalam kurun waktu 2016 – 2021 dalam rangka mewujudkan Kota Binjai sebagai Kota Idaman yang nyaman dan sejahtera

Penyusunan renstra ini selain berdasarkan hasil analisa lingkungan internal maupun eksternal organisasi juga telah mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kota Binjai tahun 2016 – 2021. Harapan kami semoga dokumen Rencana Strategis ini mampu memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Kota Binjai, Oktober 2021
Pit.KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BINJAI

H.HAMIDAN,SS.MM
NIP. 19640706 1994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT SKPD

- 2.1. Tugas Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembanagan SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT SKPD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananSKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program SKPD
- 3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan SKPD
- 3.5. Penentuan Isu isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V STRATREGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendukung pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*). Dengan semakin terbukanya era globalisasi mengakibatkan semua aspek kehidupan harus dipersiapkan untuk bersaing dalam globalisasi tersebut. Dengan kondisi seperti ini, diprediksi bahwa isu-isu permasalahan kesejahteraan sosial akan semakin berkembang, karena terjadi benturan-benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan manusia. Suatu kenyataan bahwa hasil dari benturan-benturan kepentingan dimaksud adanya dampak dari Pandemi COVID-19 yang menyerang sejak awal tahun 2020 yang pada akhirnya akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial. Permasalahan politik berujung pada permasalahan sosial, permasalahan ekonomi berujung pada permasalahan sosial, persoalan hukum berujung dengan permasalahan sosial, persoalan teknologi berujung dengan permasalahan sosial, dan lain-lain. Tetapi, tidak pernah terjadi bahwa permasalahan ekonomi berakhir dengan permasalahan politik dan berhenti hanya disitu saja. Tetapi, dipastikan akan berakhir dengan permasalahan sosial.

Pada situasi Pandemi COVID-19 seperti ini, permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, tidak hanya masalah sosial konvensional saja seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia, tetapi berbagai permasalahan sosial baru seperti pemutusan hubungan kerja, tawuran, kerusuhan antar etnis, kesewenang-wenangan, penghakiman sendiri, termasuk di dalamnya permasalahan kelompok masyarakat mulai dari kelompok kelas bawah hingga kelompok elit, seperti disharmonisasi keluarga, stress, dan lain-lain. Sudah barang tentu permasalahan sosial seperti ini sangat bervariasi.

Secara umum ada beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun *civil society* untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama, adalah penanggulangan.

RENSTRA Dinas Sosial Kota Binjai merupakan dokumen turunan dalam rangka pencapaian RPJMD Kota Binjai khususnya yang terkait dengan urusan umum pemerintahan Kota Binjai. Berkaitan dengan hal tersebut diatas sejak tahun 1999 pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai tingkat eselon II untuk menyusun Rencana strategik selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri no 54 tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategik SKPD. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah (termasuk di dalamnya SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah) diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinas Sosial Kota Binjai merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Binjai diwajibkan menyusun Rencana strategik (RENSTRA) dengan mengacu pada RPJMD Kota Binjai.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis pada Dinas Sosial Kota Binjai adalah:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);

16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai;
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Walikota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Binjai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Binjai dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun serta sebagai pengendalian kegiatan, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang mengacu pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026.

a.Maksud

Rencana strategis ini disusun dengan maksud :

- Menyediakan dokumen Rencana Strategi Dinas Sosial Kota Binjai Tahun 2021-2026 dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan Dinas Sosial Kota Binjai.
- Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Binjai ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Binjai Tahun 2021-2026 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi program/ kegiatan Dinas Sosial Kota Binjai.

b.Tujuan

Rencana strategis ini disusun dengan tujuan :

- Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026.
- Menyediakan pedoman untuk mengukur dan melakukan evaluasi tahunan Dinas Sosial Kota Binjai.
- Memudahkan seluruh Bagian pada Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Binjai Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

Menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan OPD, tantangan dan peluang serta pengembangan pelayanan OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Binjai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Binjai 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 18 Tahun 2012 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kota Binjai, Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sosial serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, Dinas sosial Kota Binjai. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Sosial Kota Binjai mempunyai fungsi:

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 34 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Binjai mempunyai tugas:

- a. Membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota
- b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Sosial yang telah ditetapkan
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparatur pelaksana dan staf Dinas Sosial

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas mempunyai fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan Fakir Miskin Perkotaan
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu
3. Penetapan standart rehabilitasi Sosial
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab sosial
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan kementerian Sosial
6. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Sosial baik lintas program maupun lintas sektoral
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan struktur organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 34 tahun 2016 sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Perberdayaan Kelembagaan Sosial, membawahi :

- Seksi Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan KAT
- Seksi Pemberdayaan sosial dan kelembagaan masyarakat
- Seksi kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial

d. Bidang Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, membawahi :

- Seksi pelayanan Rehabilitasi Anak dan lanjut Usia
- Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang cacat
- Seksi Rehabilitasi Sosial KPO, penyalahgunaan Nafza dan Tuna susila

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial membawahi:

- Seksi Perlindungan Sosial Korban bencana Alam
- Seksi perlindungan sosial korban bencana sosial
- Seksi jaminan sosial keluarga

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :

- Seksi peningkatan Penghasilan dan penguatan kapasitas keluarga fakir miskin
- Seksi penguatan restorasi sosial masyarakat
- Seksi aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

2.2 Sumber Daya OPD

Personil dan Sarana Prasarana

- a. Jumlah pegawai Dinas Sosial Kota Binjai adalah 74 orang, yang terdiri dari ASN 34, Kontrak Kerja/*Cleaning Service* 39 dan Keamanan 1. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, golongan / ruang, dan eselon dapat dilihat pada tabel 2.1 s/d tabel 2.3.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai/Personil Dinas Sosial Kota Binjai

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Proyeksi Kebutuhan (Orang)
1	ASN	34	-
2	CPNS	1	-
3	Kontrak Kerja/ <i>Cleaning Service</i>	36	-
4	Keamanan	-	-
	Jumlah		-

Sumber : Dinas Sosial Kota Binjai

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang
Dinas Sosial Kota Binjai

No	Pegawai	Jumlah/ org	Ket
1.	Berdasarkan eselon dan status pegawai		
	Jumlah = 33 orang		
2	Pejabat eselon II		
	Pejabat eselon III	1	
	Pejabat eselon IV	5	
	Staf	13	
	Tenaga kerja Pramubakti	15	
	Berdasarkan status pendidikan	33	
3	- S2		
	- S1	5	
	- D3	2	
	- SMA	8	
	- SMP	1	
	- SD	-	
	Berdasarkan golongan		
	- IV/c	1	
	- IV/b	1	
	- IV/a	6	
	- III/d	10	
	- III/c	7	
	- III/b	1	
	- III/a	4	
	- II/d	1	
	- II/c	1	
	- II/b	-	
	- II/a	1	
	- I/d	1	

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai/Personil Yang Menduduki Eselon dan
Staf Sekretariat Kota Binjai

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II/b	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	4
4.	Fungsional	11
5.	Staf	13
JUMLAH		

b. Sarana Prasarana Aparatur, berupa:

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Binjai

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Perkantoran	1	
	Rumah Dinas	1	
2	Kendaraan Roda4	3	
	Kendaraan Roda2	2	
	- Notebook	12	
	- Printer	16	
	- Mejatulis	2	
	- Dll,sesuaidataaset	5	

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas pokok dan fungsi utama Dinas Sosial Kota Binjai adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang Kesejahteraan Sosial Masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas
- b. Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan lembaga sosial
- d. Penyelenggaraan penanganan fakir miskin
- e. Penyelenggaraan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

LINGKUNGAN INTERNAL	LINGKUNGAN EKSTERNAL
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Peluang (<i>Oportunities</i>)
☐ Dukungan jumlah anggaran ☐ Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas menyangkut eksistensi keberadaan dinas sosial Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara Dinas Kota, Provinsidan kementerian Sosial	Infrastrtuktur yang cukup memadai dan dapat dikembangkan Adanya program pelatihan fungsional bagi staf untuk pengembangan SDM Adanya kebijakan Nawacita yang memprioritaskan peningkatan Kesejahteraan sosial masyarakat
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
☐ Disiplin pegawai yang kurang ☐ Pengetahuan pegawai dalam hal penanganan masalah PMKS masih kurang Kurangnya sarana prasarana pendukung	Perkembangan teknologi informasi yang makin pesat Meningkatnya daya kritis masyarakat Berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial ditengah tengah masyarakat Semakin meningkatnya kerawanan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategis sebagai faktor kunci keberhasilan atau critical sucses faktor adalah:

- a. Dengan adanya kebijakan nawacita dan dukungan anggaran diharapkan akan mampu mengatasi kerawanan sosial ditengah tengah masyarakat.
- b. Pengetahuan pegawai dalam hal penanganan masalahP MKS yang kurang akan teratasi dengan adanya program pelatihan fungsional bagi staf.
- c. Perkembangan masalah kesejahteraan sosial masyarakat dapat teratasi dengan adanya sinergi antara daerah, propinsi dan kementerian sosial Republik Indonesia.
- d. Dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang adanya akan mampu mengatasi masyarakat yang semakin kritis.

- e. Adanya dampak **COVID-19** Tahun 2020 Masih membuat masyarakat terpuruk dari sebelumnya masalah ekonomi yang semakin kritis dan memprihatinkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang pelayanan Dinas Sosial Kota Binjai mencakup :

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemahaman staf tentang peraturan-peraturan yang melandasi tugas dan fungsi organisasi masih rendah sehingga pencapaian tujuan belum maksimal.
- b. Masih rendahnya kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Masih rendahnya mutu profesionalisme pelayanan sosial untuk mengembangkan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, sehingga peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- d. Belum terwujudnya keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah- masalah sosial sehingga menyebabkan belum terwujud ketahanan sosial masyarakat dan belum terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan yang cepat melalui wadah jaringan kerja.
- e. Belum maksimalnya kualitas program penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat sehingga berdampak bagi pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- f. Belum maksimalnya identifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentu kebijakan masalah-masalah sosial.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Kelompok Sasaran	Masalah	Permasalahan Pokok
Kemiskinan	1. Kurangnya anggaran bantuan untuk masyarakat miskin.	1. Ketersediaan database PMKS yang tidak valid.
		2. Sinergitas dan sinkronisasi program/ anggaran yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.
		3. Belum maksimalnya bantuan untuk siswa miskin.
Keterlantaran	1. Kurangnya anggaran untuk penanggulangan warga terlantar.	1. Masih terdapat masalah balita yang terlantar.
		2. Bantuan perdanaan untuk anak-anak panti asuhan masih minim.
Korban Bencana	1. Kurangnya anggaran dalam penanggulangan bencana.	1. Masih kurang kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan bencana sosial.
		2. Kurangnya peringatan dini tentang bencana alam dan bencana sosial.
Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat	1. Karena keterbatasan anggaran.	1. Masih belum optimalnya lembaga-lembaga sosial masyarakat berperan dimasyarakat.
	2. Kurangnya kerjasama masyarakat.	
	3. Perlunya sosialisasi tentang peran lembaga sosial.	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Makna dari Misi Pemerintahan Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU BERBUDAYA DAN RELIGIUS”

- MAJU** Mengandung Pengertian bahwa Seiring Berjalannya Waktu. Kota Binjai Harus Terus Maju bergerak kearah yang lebih baik, Mengalami peningkatan pada semua aspek Kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya.
- BERBUDAYA** Mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan kota binjai berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku dimasyarakat sebagai filterisasi pengaruh negatif globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan krakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai. Taat azaz, taat aturan peduli dan bertoleransi sehingga tercipta masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebaga Kota maju dibanding daerah lainnya.

3. **RELIGIUS** Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang baik membantu memperjelas perwujudan visi yang ingin dicapai dan membantu upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan rangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan Visi.

Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **“Binjai yang lebih maju, Berbudaya dan Religius”** maka dirumuskan 3 misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan kota Binjai Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut.

Dari pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan dalam mengacu kemajuan kota Binjai secara terus menerus dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi Teknologi dan Informasi serta sarana dan sarana umum, bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah Kota Binjai dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk ke dalam kategori PMKS menjadi nyaman dan sejahtera pada tahun 2021.

Misi Dinas Sosial merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan peran sertanya.

MISI ke 3

Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Misi ini merupakan upaya pemerintah daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul kharimah.

Adapun program prioritas untuk mewujudkan misi ketiga adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan takwa.
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
4. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
5. Pembinaan olah raga, kepemudaan, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis dan kebudayaan.
6. Meningkatkan implementasi norma-norma budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat.

TUJUAN

Adapun tujuan pembangunan Dinas Sosial Kota Binjai tahun 2021-2026, antara lain:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi dalam 4 pilar intervensi yaitu Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, dan Perlindungan sangat terbatas.
2. Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.
3. Pemerintah Daerah Belum Maksimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan Sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan Anggaran.
4. Peran Pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program Pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari Upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.

SASARAN

Agar Penambahan fitur (Virtual aplikasi cek bansos) tersebut, bisa menjadi alat kontrol dari kemungkinan kurang tepatnya penerima bantuan sosial dan tidak dapat terjadi (*exclusion error*), atau ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (*inclusion error*).

1.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial adalah: Perlunya peningkatan kualitas SDM ASN di Dinas Sosial

untuk terlaksananya pelayanan bagi masyarakat baik segi kesehatan dan perekonomian masyarakat kurang mampu.

Permasalahan yang timbul dari isu strategis antara lain:

1. Belum maksimalnya identifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentu kebijakan masalah-masalah sosial.
2. Masih rendahnya mutu profesionalisme pelayanan sosial untuk mengembangkan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, sehingga peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat masih perlu ditingkatkan.
3. Belum maksimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat sehingga berdampak bagi pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.



Tujuan/ Sasaran	Kode (Prog)	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR, KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja perangkat daerah Penang gung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		targe t	Rp	
					targ et	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	targ et	Rp	target	Rp	targ et	Rp			
Tujuan :																			
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya																			DINAS SOSIAL
Sasaran :																			DINAS SOSIAL
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya																			DINAS SOSIAL
																			DINAS SOSIAL
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				##### ##		6,686,901,000		7,180,300,000		8,471,800,000		9,319,300,000		9,569,300,001		41,142,601,001	DINAS SOSIAL

	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan dan Evaluasi			9,236,100		120,500,000		146,500,000		177,000,000		207,500,000		238,000,000		889,500,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	5	150,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	5	150,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	5	125,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	Dokumen	-	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	5	150,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	-	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	5	125,000,000	DINAS SOSIAL

	1.06.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	9,236,100	1	10,500,000	1	11,500,000	1	12,000,000	1	12,500,000	1	13,000,000	5	59,500,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	1	20,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	5	130,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat Daerah			##### ##		5,236,000,000		5,525,000,000		6,080,000,000		6,665,000,000		7,250,000,000		30,756,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Terpenuhi	Tahun	1	##### ##	1	4,750,000,000	1	5,000,000,000	1	5,500,000,000	1	6,000,000,000	1	6,500,000,000	5	27,750,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas yang Tersedia	Tahun	-	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	5	165,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaa n dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yang Terlaksana	Tahun	-	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	5	165,000,000	DINAS SOSIAL

	1.06.01. 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi SKPD	Tahun	1	##### ##	1	366,000,000	1	375,000,000	1	400,000,000	1	425,000,000	1	450,000,000	5	2,016,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	-	-		20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	5	165,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Terlaksana	Tahun	-	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	5	165,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Akhir Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen	-	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	5	165,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	5	165,000,000	DINAS SOSIAL

	1.06.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-		70,000,000		70,000,000		70,000,000		105,000,000		105,000,000		420,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang Terlaksana	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	60,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang Terlaksana	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	60,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang Terlaksana	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	60,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	60,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	60,000,000	DINAS SOSIAL

		SKPD																	
	1.06.01. 2.03.06	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terlaksana	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	60,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD yang Termaanfatka n	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	60,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			-	-		70,000,000		70,000,000		105,000,000		140,000,000		140,000,000		525,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Retribusi Daerah yang Terencana	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	75,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.04.02	Analisa dan Pengembanga n Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembanga n Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah yang Terlaksana	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	75,000,000	DINAS SOSIAL

	1.06.01. 2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah yang Terlaksana	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	75,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Objek Retribusi Daerah yang Terdata dan Terdaftar	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	75,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah yang Terlaksana	Dokumen	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	75,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah yang Terlaksana	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	75,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	75,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						270,000,000		345,500,000		383,000,000		407,500,000		458,000,000		1,779,000,000	DINAS SOSIAL

	1.06.01. 2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persen	-	-	50	30,000,000	70	30,000,000	80	35,000,000	80	40,000,000	80	45,000,000	360	180,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Orang	-	-	40	30,000,000	40	30,000,000	40	35,000,000	40	40,000,000	40	45,000,000	200	180,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang Terlaksana	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	13,000,000	1	15,000,000	1	18,000,000	5	66,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian yang Terlaksana	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	13,000,000	1	15,000,000	1	18,000,000	5	66,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang Terlaksana	Tahun	-	-	1	15,000,000	1	15,500,000	1	16,000,000	1	16,500,000	1	17,000,000	5	80,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun yang Terlaksana	Orang	-	-	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	2	20,000,000	3	3,000,000	14	113,000,000	DINAS SOSIAL

	1.06.01. 2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang Terlaksana	Orang	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	7,000,000	5	29,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Pemindahan Tugas ASN yang Terlaksana	Orang	-	-	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	10	50,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Terlaksana	Diklat	-	-	6	85,000,000	7	100,000,000	8	120,000,000	9	140,000,000	10	160,000,000	40	520,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	Kegiatan	-	-	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	10	75,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Terlaksana	Kegiatan	-	-	2	30,000,000	3	90,000,000	3	90,000,000	3	90,000,000	4	120,000,000	15	420,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				##### ##		470,101,000		512,500,000		549,500,000		606,500,000		661,000,000		2,799,601,000	DINAS SOSIAL

	1.06.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Tersedia	Tahun	1	##### ##	1	19,500,000	1	21,000,000	1	23,000,000	1	25,000,000	1	27,000,000	5	115,500,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Tahun	-	-	1	20,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	5	130,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga Terlaksana yang Tersedia	Tahun	-	-	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	5	90,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	Tahun	1	##### ##	1	85,000,000	1	85,500,000	1	86,500,000	1	88,500,000	1	90,000,000	5	435,500,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	Tahun	1	##### ##	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	5	175,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang- Undangan	Bahan Baca dan Peraturan Perundang- Undangan yang Tersedia	Tahun	1	##### ##	1	20,500,500	1	21,000,000	1	22,000,000	1	23,000,000	1	24,000,000	5	110,500,500	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Materia l	Bahan/Materia l yang Tersedia	Tahun	-	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	5	270,000,000	DINAS SOSIAL

	1.06.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Tersedia	Tahun	-	-	1	15,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	5	95,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.06.09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Terselenggara	Tahun	1	##### ##	1	200,100,500	1	235,000,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	300,000,000	5	1,260,100,500	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang Terlaksana	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	11,500,000	1	12,500,000	1	15,000,000	5	59,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	11,500,000	1	12,500,000	1	15,000,000	5	59,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-	80,000,000		95,000,000		585,000,000		600,000,000		70,000,001		1,430,000,001	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Adanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	-	-	-	1	20,000,000	-	-	1	500,000,000	-	-	2	520,000,000	DINAS SOSIAL

	1.06.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Adanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	-	1	20,000,000	-	-	1	500,000,000	-	-	-	-	2	520,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Adanya Alat Besar	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Adanya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Unit	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	50,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Adanya Mebel	Unit	-	-	3	30,000,000	3	40,000,000	3	50,000,000	3	60,000,000	3	60,000,000	15	240,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Adanya Aset Tetap Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Adanya Aset Tak Berwujud	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Adanya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL

	1.06.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Adanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Adanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	1	5	100,000,001	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				##### ##		198,300,000		213,300,000		238,800,000		259,300,000		279,800,000		1,189,500,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat yang Tersedia	Tahun	1	4,703,200	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	5	125,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	Tahun	1	##### ##	1	95,500,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	120,000,000	1	130,000,000	5	555,500,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Tahun	-	-	1	35,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	5	240,000,000	DINAS SOSIAL

	1.06.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Tahun	1	##### ##	1	52,800,000	1	53,300,000	1	53,800,000	1	54,300,000	1	54,800,000	5	269,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				##### ##		172,000,000		202,500,000		283,500,000		328,500,000		367,500,000		1,354,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia	Tahun	-	-	-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	4	110,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Tahun	1	##### ##	1	125,000,000	1	130,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	855,000,000	DINAS SOSIAL

	1.06.01. 2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar yang Tersedia	Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia	Tahun	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	15,000,000	5	20,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Mebel yang Terpelihara	Tahun	-	-	1	1,000,000	1	1,500,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,500,000	5	9,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksana yang Terpelihara	Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya yang Terpelihara	Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud yang Terpelihara	Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL

	1.06.01. 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara/ Terehabilitasi	Tahun	-	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	5	135,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang Terpelihara/ Terehabilitasi	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	5	100,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara/ Terehabilitasi	Tahun	-	-	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	5	100,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09.12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Tanah yang Terpelihara/ Terehabilitasi	Tahun	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	25,000,000	DINAS SOSIAL
Tujuan :																			DINAS SOSIAL
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Standar Hidup yang Layak, Masyarakat yang Sejahtera Berkeadilan																			DINAS SOSIAL
Sasaran :																			DINAS SOSIAL

Terwujudnya Peningkatan Standar Hidup Layak, Kesejahteraan, Keadilan dan Kenyamanan																		DINAS SOSIAL
1.06 .02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial			##### ##	3,320,000,000	3,680,000,000	5,005,000,000	5,360,000,000	6,025,000,000	23,390,000,000	DINAS SOSIAL						
		2. Jumlah Fakir Miskin yang diberdayakan																
		3. Jumlah Kelembagaan Sosial yang diberdayakan																
1.06 .02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL	
1.06 .02.2.01 .01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL	
1.06 .02.2.01 .02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL	
1.06 .02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL	

	1.06 .02.2.02 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL
	1.06 .02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				##### ##		3,320,000,000		3,680,000,000		5,005,000,000		5,360,000,000		6,025,000,000		23,390,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.02. 2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembinaan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	4	1,170,000,000	5	1,170,000,000	6	2,000,000,000	7	2,000,000,000	8	2,300,000,000	30	8,640,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.02. 2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	4	1,000,000,000	4	1,200,000,000	5	1,400,000,000	5	1,500,000,000	6	1,600,000,000	24	6,700,000,000	DINAS SOSIAL

	1.06.02. 2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	Terbantunya dana operasional Lembaga Karang Taruna di Kota Binjai	Lembaga	-	-	43	300,000,00 0	46	330,000,000	50	360,000,000	55	400,000,000	60	450,000,000	254	1,840,000,0 00	DINAS SOSIAL
	1.06.02. 2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot a	Pelatihan ke Luar Daerah	Peserta	71	##### ##	64	700,000,00 0	70	750,000,000	70	900,000,000	75	1,000,000,000	75	1,100,000,000	354	4,450,000,0 00	DINAS SOSIAL
	1.06.02. 2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Klien Dalam Penenganan Masalah Kelembagaan Masyarakat dapat Dilayani dengan Baik	Orang	-	-	13	150,000,00 0	20	230,000,000	30	345,000,000	40	460,000,000	50	575,000,000	153	1,760,000,0 00	DINAS SOSIAL
Tujuan :																			DINAS SOSIAL
Terlaksannya pemulangan orang terlantar Kota Binjai untuk dipulangkan ke Daerah																			DINAS SOSIAL

asal																			
Sasaran :																			DINAS SOSIAL
	1:06:03	PROGRAM PENANGANA N WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Pekerja Migran yang Dipulangkan			60,000,00 0		80,000,000		100,000,000		120,000,000		140,000,000		160,000,000		600,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.03. 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/K ota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurah an Asal		Orang	20	60,000,00 0	20	80,000,000	25	100,000,000	30	120,000,000	35	140,000,000	40	160,000,000	150	600,000,000	DINAS SOSIAL

	1.06.03. 2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Tertanggulanginya orang terlantar Kota Binjai untuk dipulangkan ke Daerah asal	Orang	20	60,000,000	20	80,000,000	25	100,000,000	30	120,000,000	35	140,000,000	40	160,000,000	150	600,000,000	DINAS SOSIAL
Tujuan :																			DINAS SOSIAL
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial di Kota Binjai																			DINAS SOSIAL
Sasaran:																			DINAS SOSIAL
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Tertangani			##### ##		1,555,000,000		1,420,000,000		1,595,000,000		1,770,000,000		1,945,000,000		8,285,000,000	DINAS SOSIAL

	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				44,955,800		540,000,000		270,000,000		305,000,000		340,000,000		375,000,000		#VALUE!	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Permakanan yang terpenuhi bagi PPKS	Orang	-	-	20	50,000,000	25	55.000.000	30	60.000.000	35	65.000.000	40	70.000.000	150	#VALUE!	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah sandang yang terpenuhi bagi PPKS	Orang	-	-	20	50,000,000	25	55.000.000	25	60.000.000	25	65.000.000	25	70.000.000	120	#VALUE!	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang terpenuhi bagi PPKS	Orang	-	-	20	75,000,000	25	80.000.000	25	90.000.000	25	100.000.000	25	110.000.000	120	#VALUE!	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	-	-	10	50,000,000	15	60.000.000	15	70.000.000	15	80.000.000	15	90.000.000	70	#VALUE!	DINAS SOSIAL

	1.06.04. 2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	jumlah orang yang mendapat bimbingan fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	10	44,955,800	15	60,000,000	20	70.000.000	25	80.000.000	25	90.000.000	25	100.000.000	110	#VALUE!	DINAS SOSIAL
	1.06.04. 2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah orang yang mendapat Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	-	-	10	20,000,000	15	30.000.000	20	40.000.000	25	50.000.000	25	60.000.000	95	#VALUE!	DINAS SOSIAL
	1.06.04. 2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PPKS yang terfasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	-	-	25	50,000,000	25	60,000,000	25	70,000,000	25	80,000,000	25	90,000,000	125	350,000,000	DINAS SOSIAL
	1.06.04. 2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS yang mendapat Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Orang	-	-	20	50,000,000	20	55,000,000	20	60,000,000	25	65,000,000	20	70,000,000	105	300,000,000	DINAS SOSIAL